

PARTISIPASI MASYARAKAT HAK ULAYAT DALAM MENDUKUNG BANDARA FRANS KAISIEPO MENJADI BANDARA INTERNASIONAL

Iswahyudi

Program Studi Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak (Papua)

Abstrak

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Hak Ulayat dalam pembangunan Bandar Udara Frans Kaisiepo menjadi bandara Internasional dalam penelitian ini menggunakan teori Holil (1980:10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu Komunikasi Yang Intensif, Iklim Sosial, Ekonomi, Politik dan Budaya, Kesempatan Untuk Partisipasi, Kebebasan untuk berpraktis berkreasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan lokasi penelitian PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Frans Kaisiepo JL Prof. M Yamin 64, Biak -Papua. Hasil penelitian adalah Partisipasi masyarakat hak ulayat dalam pembangunan Bandara Frans Kaisiepo cukup baik karena sebagian besar masyarakat hak ulayat telah berperan dengan memberikan kontribusi baik berupa kritik maupun saran namun ada pula masyarakat hak ulayat yang belum dengan baik ikut serta dalam pembangunan Bandara Frans Kaisiepo menjadi Bandara Internasional karena dengan alasan kurang perhatiannya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ganti rugi kepada sebagian masyarakat hak ulayat. hal ini yang membuat masyarakat hak ulayat tidak dapat merelakan mereka untuk membuat surat pelepasan tanah, agar PT. Angkasa Pura I (persero) sebagai pengelola dapat bekerja dengan baik tanpa ada permasalahan lagi dengan pihak hak Ulayat.

Pendahuluan

Pembangunan biasanya di definisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, misalnya pembangunan di bidang ekonomi, apabila pembangunan ekonomi telah berjalan dengan baik maka pembangunan di bidang lain akan berjalan dengan baik. Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu di bangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah dan pihak PT. Angkasa Pura I (Persero) dalam proses menjadikan Bandara Frans Kaisiepo untuk menjadi Bandara Internasional.

Masyarakat adalah pemilik kedaulatan, dalam perencanaan yang menyangkut kesejahteraan mereka dan melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program yang dicapai.

Partisipasi masyarakat hak ulayat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata salah satu kritik adalah masyarakat merasa "tidak memiliki" dan "acuh tak acuh" terhadap program pembangunan yang ada.

Namun demikian ragam partisipasi seringkali ditentukan secara massa yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Sejauh ini, partisipasi

masyarakat hak ulayat masih terbatas pada keikutsertaan dalam mendukung Bandara Frans Kaisiepo menjadi Bandara Internasional.

Bandara Frans Kaisiepo Pada periode 1996-1998 Garuda Indonesia menerbangi rute Jakarta-Denpasar-Biak-Honolulu-Los Angeles dengan pesawat berbadan lebar MD-11. bandara ini sebenarnya sanggup didarati pesawat Boeing 747 seri 400. sayangnya rute Internasional melintasi Samudra Pasifik tersebut terhenti karena hantaman krisis ekonomi. Sejak itu pula status Bandara Internasional terhenti, hingga sekarang.

Padahal bandara yang di bangun di atas litologi batu gamping (limestones) alias batu karang ini amat kokoh dan bersifat keras. Letak geografis di garis ekuator dan di mulut Samudra Pasifik menjadikan Bandara Frans Kaisiepo tetap penting. Sempat terpetik kabar pembangunan kawasan perdagangan berikat di Biak, lantaran punya dukungan bandara yang berkualitas internasional dan pelabuhan laut di antara wilayah kepulauan Nusantara dan Samudra Pasifik. Kondisi bandara saat ini tergolong menarik. Pagar bandara banyak yang bolong dan penduduk sipil bisa dengan bebas beraktivitas di dalam wilayah bandara. Bahkan nelayan bisa menjemur ikan dan anak-anak bisa bermain di atas landasan pacu. Sebelum pesawat mendarat, pasti akan ada sirene yang mengaum keras, yang menandakan bahwa aktivitas di wilayah bandara harus di hentikan sementara setelah pesawat lepas landas maka aktivitas di landasan pun kembali seperti sedia kala.

Kondisi ini terjadi karena masyarakat setempat tidak ikut berpartisipasi dalam menjadikan Bandara Frans Kaisiepo menjadi Bandara Internasional apa lagi partisipasi masyarakat hak ulayat sampai saat ini tidak merelakan tanah mereka. Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini di sebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya tidak

dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat di tinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya.

Tanah mempunyai nilai yang penting bagi masyarakat, maka sebutan tanah air dan tumpah darah di pergunakan oleh bangsa indonesia untuk menyebutkan tanah negara dengan menggambarkan wilayah yang di dominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat. Keterikatan antara orang dengan tanah yang di miliki, menjadi sangat kompleks dengan berbagai dimensinya, sehingga proses pengambilan tanah penduduk tanpa adanya unsur-unsur "kerelaan" dari pemegang hak akan menimbulkan banyak masalah. Persoalan pengadaan tanah, pencabutan hak atau pelepasan hak menyangkut dua dimensi yang harus di tempatkan secara seimbang yaitu kepentingan "pemerintah" dan kepentingan "warga masyarakat".

Tinjauan Pustaka

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keikutsertaan, peranserta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya (Sasrtopectro, 1995). Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materill (PTO PNPM PKK, 2007). Menurut Ach. Wasir Ws., et al. (1999:29) partisipasi bisa di artikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar kedalam inretaksi sosial dalam situasi tertentu dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, dan tanggung jawab bersama. Verhangen (1979) dalam mardikanto (2003) menyatakan

bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Theodorson dalam mardikanto (1994) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu.

Isbandi (2007:27) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dengan demikian berdasarkan dari definisi-definisi partisipasi yang telah diungkapkan oleh beberapa pakar diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian partisipasi adalah keikutsertaan, atau keterlibatan langsung dari seseorang atau kelompok (masyarakat) secara sadar untuk bekerjasama dan berperan aktif secara sukarela dalam suatu kegiatan atau program yang ada di dalam lingkungan sosialnya yaitu ikut terlibat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pada tahap evaluasi dan pemeliharaan hasil yang telah dicapai.

Bentuk dan Tipe Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi ketrampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat

dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu : Partisipasi Nyata dan Tidak Nyata.

Jenis partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata yaitu :

- Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengamalan dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang di ikuti.
- Partisipasi sosial diberikan oleh partisipasi sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
- Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.
- Partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsure luar/lingkungan. Menurut Holil (1980:10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu; a) Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara system sosial di dalam masyarakat dengan system diluarnya; a) Iklim sosial, ekonomi, politik

dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat; b) Kesempatan untuk partisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, system nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial; c) Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

Pengertian Hak Ulayat

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Disinilah sifat religius hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya ini. Adapun tanah ulayat atau tanah bersama yang dalam hal ini oleh kelompok di bawah pimpinan kepala adat masyarakat hukum adat, misalnya adalah hutan, tanah lapangan, dan lain sebagainya, tanah untuk pasar, penggembalaan, tanah bersama, dan lain-lainnya pada intinya adalah demi keperluan bersama.

Pengertian terhadap istilah hak ulayat di tegaskan oleh G. Kertassapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya hukum tanah, jaminan UUPA bagi keberhasilan pendayagunaan tanah mengatakan bahwa : " hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin keterlibatan pemanfaatan/pendayaguna tanah. Hak ulayat

adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku) dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya di atur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)".

Komponen Dasar Pembangunan

Prof. Goulet mengatakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen dasar tersebut adalah kecukupan, jati diri, serta kebebasan, ketiga hal inilah yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Ketiganya berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai macam bentuk hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang zaman.

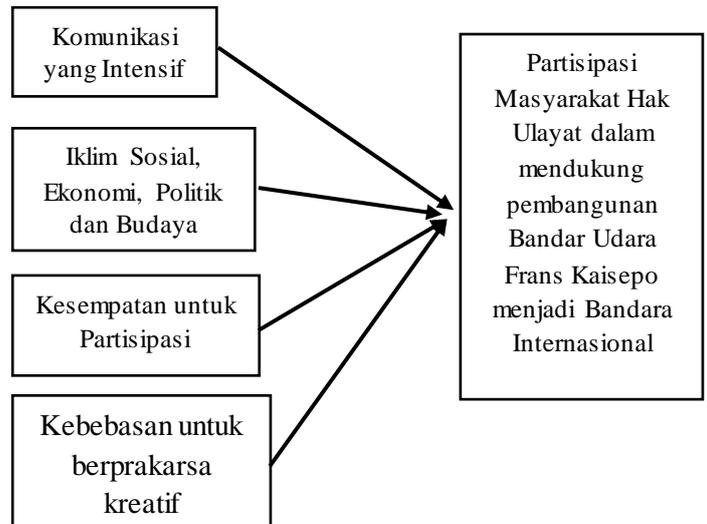
Kecukupan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, kecukupan disini bukan hanya menyangkut makanan, melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Semua orang pasti punya kebutuhan dasar. Apa yang disebut dengan kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang, kebutuhan dasar ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Jika satu saja dari sekian banyak kebutuhan dasar tidak terpenuhi maka muncullah kondisi "keterbelakangan absolute" fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin perangkat dan bekal guna menghindari segala kesengsaraan dan ketidak berdayaan yang diakibatkan oleh kekurangan pangan, sandang, papan,

kesehatan, dan keamanan atas dasar itulah kita bisa menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan itu merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan.

Jati diri, menjadi manusia seutuhnya adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu, dan seterusnya. Pencarian jati diri bukan suatu urusan yang sepele, karena jati diri itu sendiri bukan hal yang sepele. Sekali jati diri kita hilang, maka kita akan kehilangan segala-galanya.

Kebebasan dari sikap menghambat, adalah konsep kemerdekaan manusia. Kebebasan disini hendaknya diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan ini. Kebebasan disini juga harus diartikan sebagai kebebasan terhadap ajaran-ajaran yang dogmatis. Jika kita memiliki kebebasan itu berarti untuk selamanya kita mampu berpikir jernih dan menilai segala sesuatu atas dasar keyakinan, pikiran sehat, dan hati nurani kita sendiri. Kebebasan juga meliputi kemampuan individual atau masyarakat untuk memilih satu atau sebagian dari sekian banyak pilihan yang tersedia. Dengan adanya kebebasan, kita tidak semata-mata dipilih, melainkan kitalah yang akan memilih. Kesimpulan dari ketiga komponen dasar pembangunan seperti yang telah diuraikan sebelumnya yaitu bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin, melalui serangkaian kombinasi proses social, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

Kerangka Pemikiran



Metode Penelitian

Lokasi Penelitian: Maka yang menjadi lokasi penelitian disini adalah PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Frans Kaisiepo JL Prof. M Yamin 64, Biak -Papua.
Jenis Penelitian: Peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mana dapat di gambarkan secara objektif berdasarkan data/fakta yang di peroleh di lokasi penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta ,sifat-sifat objektif tertentu (Krisyantono, 2007. Hal.69).

Teknik Analisa Data

Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis persentase atau teknik deskriptif kualitatif. Dimana penulis berusaha mengelompokan hasil dari partisipasi masyarakat hak ulayat dalam mendukung pembangunan bandara Frans Kaisiepo menjadi Bandara Internasional. melalui tahap sebagai berikut:1. Pengumpulan data, 2. Redaksi data 3. Display data, 4. Verifikasi dan kesimpulan :

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Partisipasi masyarakat adat merupakan suatu bentuk penerapan hak asasi manusia. George Pring dan Susan Y Neo mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat meliputi semua nama yang digunakan untuk menggambarkan bermacam-macam mekanisme, dan dipakai oleh individu atau kelompok untuk mengkomunikasikan pendapat atau pandangan mereka tentang suatu isu public.

Hak-hak khusus atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat adalah : a) Berpartisipasi dalam penggunaannya. Partisipasi ini dalam arti masyarakat adat mempunyai hak untuk menggunakan, mengambil hasil atau untuk di manfaatkan bagi keperluan lainya arti partisipasi adalah masyarakat adat ikut serta ketika pemerintah atau pihak swasta menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan komersial sehingga masyarakat adat juga ikut mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut. b) Hak masyarakat adat dalam manajemen sumber daya alam. c) Hak masyarakat adat untuk pelestarian sumber daya alam.

Dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Bandara Frans Kaisiepo, sangat bergantung pada peran pemerintah daerah dan pusat serta peran dari Masyarakat Hak Ulayat itu sendiri dan PT. Angkasa Pura I (persero). Tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, tidak dapat mencapai hasil pembangunan yang optimal, dan tidak sesuai dengan kemauan masyarakat dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran pemerintah yang optimal maka pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan lambat, begitu juga dengan PT. Angkasa Pura I (persero) tanpa pemerintah dan masyarakat hak ulayat maka pembangunan Bandara Frans Kaisiepo akan berjalan sangat lambat.

Untuk itu diharapkan kepada pemerintah untuk berperan secara optimal agar mampu berikan motivasi kepada masyarakat, agar masyarakat hak ulayat dapat berpartisipasi dengan baik, bekerjasama dengan baik dengan PT. Angkasa Pura I (persero) dalam pelaksanaan pembangunan bandara Frans Kaisiepo menjadi bandara Internasional.

1. Partisipasi masyarakat Hak Ulayat Dalam Mendukung Pembangunan Bandara Frans Kaisiepo Menjadi Bandara Frans Kaisiepo.

Partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan terkadang di pengaruhi beberapa faktor yang mengakibatkan masyarakat kurang berpartisipasi dan juga masyarakat berpartisipasi secara aktif menurut Holil (1980:10) , faktor-faktor tersebut ialah : a) Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinanya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem luarnya.

Sedangkan, berdasarkan wawancara yang telah di lakukan kepada informan , komunikasi yang terjalin antara PT. Angkasa Pura I (persero) dan kelompok masyarakat Hak Ulayat yang mengatakan bahwa komunikasi sudah terjalin dengan baik antara PT. Angkasa Pura I (persero) dan masyarakat hak ulayat , dan kelompok masyarakat Hak Ulayat yang mengatakan Komunikasi yang terjalin antara PT angkasa Pura dan masyarakat Hak ulayat tidak baik atau kurang baik. Berdasarkan pendapat parah ahli dan jawaban dari para informan penulis mengambil kesimpulan bahwa antara warga masyarakat hak ulayat sendiri komunikasi itu tidak terjalin secara baik, masih mengalami perbedaan pendapat yang membuat terbentuknya kelompok-kelompok pada masyarakat hak ulayat dan sampai saat ini belum ada kesepakatan dari masyarakat hak ulayat , inilah yang membuat komunikasi antara seluruh masyarakat hak ulayat dan PT.

Angkasa Pura I (persero) belum terjalin semaksimal mungkin. Bila komunikasi antara warga masyarakat hak ulayat baik maka komunikasi antara PT. Angkasa Pura I (persero) pun akan berjalan dengan baik. b) Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, kepada informan, iklim sosial politik dan budaya masyarakat setempat kurang mendukung masyarakat dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat tersebut dalam berpartisipasi untuk pembangunan bandara Frans Kaisiepo menjadi bandara internasional, ekonomi juga mempengaruhi masyarakat tersebut untuk berpartisipasi dalam program pembangunan karena faktor pendidikan yang kurang memadai sehingga mengakibatkan cara berfikir masyarakat sangat sempit inilah yang membuat perekonomian masyarakat sangat prihatin, politik juga mempengaruhi masyarakat dalam mendukung bandara Frans Kaisiepo menjadi bandara internasional karena dengan adanya pembangunan tersebut masyarakat menggunakan hal ini sebagai suatu kesempatan untuk mendapatkan suatu keuntungan, dan budaya sangat mempengaruhi karena dengan adanya budaya masyarakat yang sangat kuat membuat pembangunan bandara Frans Kaisiepo sulit untuk menjadi bandara internasional karena adanya masalah hak ulayat yang sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Menurut para ahli dan jawaban dari informan penulis mengambil kesimpulan bahwa iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan masyarakat maka pertumbuhan dan pengembangan cara

berpikir masyarakat akan menjadi lebih baik dan masyarakat pun dengan mudah dapat berpartisipasi dalam pembangunan bandara Frans Kaisiepo menjadi Bandara Internasional. c) Kesempatan untuk berpartisipasi, keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada informan, PT. Angkasa Pura I (persero) memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat (masyarakat hak ulayat) dalam berpartisipasi untuk pembangunan bandara Frans Kaisiepo menjadi Bandara Internasional namun tidak semua masyarakat demikian, ada beberapa masyarakat yang tidak ingin menanggapi kesempatan yang di berikan PT. Angkasa Pura I (persero) karena belum adanya pembayaran ganti rugi atau pembayaran ucapan terimakasih kepada mereka pemilik tanah.

Menurut para ahli dan jawaban dari informan penulis mengambil kesimpulan bahwa. Apabila kebebasan yang diberikan PT. Angkasa Pura I (persero) dianggapi secara baik oleh masyarakat hak ulayat maka hal ini tidak akan terjadi masyarakat pasti akan ikut serta berpartisipasi dengan baik karena adanya kesempatan yang diberikan. d) Kebebasan untuk berprakarsa berkreasi, lingkungan di dalam keluarga masyarakat timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok

Berdasarkan wawancara yang di lakukan kepada informan, PT. Angkasa Pura memberikan kebebasan untuk melakukan upaya atau mengusahakan sesuatu dengan kreatif dalam mendukung bandara Frans Kaisiepo, kenyataan yang ada masyarakat hanya melakukan upaya agar supaya permasalahan tanah hak ulayat dapat di selesaikan, dan upaya yang banyak di

lakukan hanya dari PT. Angkasa Pura I (persero) seperti memperbaiki pagar-pagar yang rusak, melakukan hubungan dengan kepala kampung dalam rangka penyelesaian permasalahan hak ulayat, memperbaiki bagian landasan yang lubang-lubang akibat individu-individu yang tidak bertanggung jawab, dan masih banyak lagi.

Merurut pendapat para ahli dan jawaban para informan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat yang telah diberikan kesempatan oleh PT. Angkasa Pura I (persero) belum begitu kreatif karena apabila kesempatan itu digunakan secara baik maka kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bandara Frans Kaisiepo dapat di cegah karena mereka merasa bertanggung jawab atas bandara Frans Kaisiepo. Jadi dalam melakukan partisipasi komunikasi, iklim sosial, ekonomi, politik, budaya, kesempatan, kebebasan untuk berprakarsa kreatif itu sangat dibutuhkan masyarakat agar masyarakat dapat dengan mudah untuk berpartisipasi secara aktif dalam suatu pembangunan karena pembangunan bandara Frans Kaisiepo untuk menjadi bandara internasional keuntungannya bukan hanya pada pemerintahan dan PT. Angkasa Pura I (persero) melainkan pada masyarakat setempat pula merasakan manfaatnya, inilah beberapa faktor yang dapat membuat pembangunan berhasil.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan: Pembangunan Bandara Frans Kaisiepo tidak dapat terlepas dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, di mana masyarakat sebagai subjek dan objek dari pembangunan tersebut artinya masyarakat yang sendiri terlibat dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada pemanfaatan hasil dan pemeliharaan hasil pembangunan tersebut

dan pemerintah adalah sebagai motivator dan pendamping bagi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat hak ulayat dalam pembangunan Bandara Frans Kaisiepo cukup baik karena sebagian besar masyarakat hak ulayat telah berperan dengan memberikan kontribusi baik berupa kritik maupun saran namun ada pula masyarakat hak ulayat yang belum dengan baik ikut serta dalam pembangunan Bandara Frans Kaisiepo menjadi Bandara Internasional karena dengan alasan kurang perhatiannya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ganti rugi kepada sebagian masyarakat hak ulayat. Hal ini yang membuat masyarakat hak ulayat tidak dapat merelakan mereka untuk membuat surat pelepasan tanah, agar PT. Angkasa Pura I (persero) sebagai pengelola dapat bekerja dengan baik tanpa ada permasalahan lagi dengan pihak hak ulayat.

Saran : Aparat pemerintah lebih jeli dalam menyelesaikan permasalahan ganti rugi karena pemerintah motivator bagi masyarakat dan pendamping bagi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan, Pemerintah juga harus menjalin komunikasi dengan baik antara PT. Angkasa Pura I (persero) dan masyarakat, Memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat hak ulayat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Bandara Frans Kaisiepo, Perlu adanya kesadaran dan kemampuan dari masyarakat untuk ikut berperan dalam pembangunan tersebut dan memberikan kontribusi yang baik terhadap pembangunan. Perlu adanya pembangunan pariwisata dari pemerintah yang baik dan menarik perhatian, agar supaya banyak pengunjung yang datang ke kabupaten Biak Numfor.

Daftar Pustaka

- Ach. Wazir Ws, et al, ed. 1999. *Panduan Penguatan Menejemen*. Jakarta: Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit PT. Rineke Cipta.
- , 2005. *Manajemen Penelitian*. Cetakan Ketujuh, Rineke Cipta.
- Boerdi, Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan.
- Budiyono. 2003. *Metedologi Penelitian Pendidikan*. Surakarta: UNS Press
- Holil, Soelaiman. 1980. *Partisipasi sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung:
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas ; dari pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI Press.
- Juliantara. 2004. *Pembaharuan Kabupaten*, Yogyakarta: Pembaharuan.
- Krisyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Mansoben. J. R. 1995 *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya Indonesia; Studi Perbandingan*. Leiden: Universitas Leiden
- Mardikanto. 2003. *Redetinisi Penyuluhan*. Jakarta:Penerbit Puspa.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya*
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ross, Murray G., and B.W. Lappin. 1967. *Community Organization: Theory, principles and Practice. Second Edition*. NewYork: Harper & Row Publishers.